

RENCANA KERJA TAHUN 2024



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat-NYA Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 dapat kami rampungkan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,

Ir. R U L I, MT

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19640727 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	39
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	47
BAB V PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel T-C 30 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang.....

Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis, perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026.

telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 yang kemudian akan di jabarkan melalui rencana kerja pada tiap tahunnya. Tahun 2024 diperlukan perencanaan rencana kerja untuk satu tahun kedepan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
- Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stake holder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Sidenreng Rappang didasari oleh:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- g) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pembangunan rumah Ibadat;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;

- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Konflik Sosial;
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- t) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang

daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

- u) Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah;
- v) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);
- w) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- x) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas;
- y) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja ini di susun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD Tahun 2024 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RAPBD Tahun 2024,
- b) Menjadi penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 1 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini terdiri atas:

- ❖ Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

❖ Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

❖ Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

❖ Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri atas:

❖ Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

❖ Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, dja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

❖ Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- ❖ Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:
 - 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 - 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 - 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- ❖ Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

 - 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH , terdiri atas:

- ❖ Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- ❖ Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

❖ Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Misal:
 - a. Jumlah Program dan kegiatan
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dana apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pencapaian pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2021 dan 2022 menjadi salahsatu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Realisasi kinerja tercapai 100% hampir pada semua kegiatan pada tahun 2022, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan rutin. Kegiatan - kegiatan yang tercapai adalah sbb:

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peraangkat daerah.
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat
- ✓ Administrasi Umum Perangkat
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian kinerja renja pada tahun 2022 dikarenakan realisasi kinerja pada beberapa kegiatan tersebut menyesuaikan kondisi kebutuhan pada tahun berjalan

seperti pada kegiatan: pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berpengaruh signifikan dikarenakan target-target yang tidak tercapai merupakan program kegiatan rutin.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan lebih mempertimbangkan besaran kebutuhan dan kemampuan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

TABEL T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini	100 %		100	100	100%	100	100	100%
	1. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah dialog dan koordinasi	48 Bln		0	0	0%	12	12	25%
	2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	60 Laporan		12	12	100%	12	24	40%
	3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Rapat koordinasi FKUB	7 Kali		0	0	0%	0	1	14%
	4. Penguatan Forum Pembauraan Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rapat koordinasi FPK	7 Kali		0	0	0%	0	1	14%

RENCANA AWAL KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pembangunan Wawasan Kebangsaan		Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan									
		100	%		100	100	100%	100	100	100%	
	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi	30	Org		30	30	100%	0	30	100%
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	780	Org		0	0	0%	130	130	17%
	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	65	Org		65	65	100%	0	65	100%
	3. Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	780	Org		0	0	0%	0	130	17%
	4. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	800	Org		0	0	0%	200	200	25%

RENCANA AWAL KERJA 2024

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	5. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	1300	Org	0	0	0%	260	260	20%
	6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	520	Org	0	0	0%	130	130	25%
	7. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	1300	Org	0	0	0%	260	260	20%
	8. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Ormas	Jumlah ormas ber SKT	90	Ormas	0	0	0%	75	75	83%
	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan	100	Org	100	100	100%	100	100	100%
	1. Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan	420	Org	420	420	100%	0	420	100%
	2. Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas	100	Org	100	100	0%	0	100	100%
	3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK	198	Org	198	198	100%	0	198	100%
	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat & SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik	100	%	100	100	100%	100	100	100%
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	1560	Org	130	130	100%	130	260	17%
	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	55	Dok	11	11	100%	11	22	40%

RENCANA AWAL KERJA 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100 %		100	100	100%	100	100	100%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	1260 Lbr		220	220	100%	250	470	37%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	60 Bln		12	12	100%	12	24	40%
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	60 Bln		12	12	100%	12	24	40%
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	70 Unit		12	12	100%	13	25	36%
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 Bln		12	12	100%	12	24	40%
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bln		12	12	100%	12	24	40%
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	334 Buah		61	61	100%	70	131	39%
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180 Eksp		36	24	67%	36	60	33%
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	314 Kali		34	34	100%	70	104	33%
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	675 Kali		29	1	3%	155	156	23%
	11. Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	60 Bln		12	12	100%	12	24	40%

RENCANA AWAL KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %		100	100	100%	100	100	100%
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	234 Buah		30	30	100%	54	84	36%
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	38 Unit		3	3	100%	9	12	32%
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 Unit		1	1	100%	1	2	40%
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	70 Unit		12	10	83%	13	23	30%
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	60 Unit		5	5	100%	10	15	25%
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	50 Unit		6	6	100%	10	16	32%
	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	4 Unit		0	0	0%	1	1	25%
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %		0	0	0%	100	100	100%
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21 Laporan		5	5	100%	4	9	43%
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	4 Laporan		0	0	0%	1	1	25%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Jabatan Kelompok Fungsional
- d. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas Jabatan Kelompok Fungsional
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan adalah:

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;

- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Merencanakan Program Kerja Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- j. Mengikuti rapat-rapat terikat urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- l. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- n. menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- o. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ideology, wawasan kebangsaan karakter bangsa;
- p. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang politik dalam negeri;
- q. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ketahanan ekonomi, social, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
- r. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan politik;

- t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- b. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan urusan urusan rumah tangga badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- v. menilai kinerja pegawai

- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyipian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. Melaksanakan perumusan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- h. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;

- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- o. Menyusun rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- p. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- q. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- r. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- s. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- t. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- u. Melaksanakan perumusan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- v. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- w. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- x. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;

(4) Bidang Kesatuan Bangsa

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesatuan bangsa.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- g. Melaksanakan perumusan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- h. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- i. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan

- antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa;
 - l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kesatuan bangsa perumusan kebijakan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Indikator kinerja pelayanan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL T-C 30
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Kesbangpol					Realisasi Capaian		Proyeksi			CATATAN ANALISIS
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020 (per Juni 2020)	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000			15.08%	14.41%	13.62%	12.86%	12,12%	12.14%		13.62%	12.86%	12,12%	
2.	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu		√	83.60%	-	-	-	83,30%	83.60%	-	-	-	83,30%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu-isu penting yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

A. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

1. Rendahnya pendidikan politik bagi kaum pemilih pemula dan kaum marjinal,
2. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah,
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait undang-undang ormas,
4. Belum optimalnya pendataan ormas mengakibatkan rendahnya pengawasan terhadap ormas.

B. Bidang Kesatuan Bangsa

1. Sengketa lahan HGU di beberapa wilayah
2. Kelangkaan gas elpiji tabung 3 kg
3. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih tinggi
4. Unjuk rasa/aksi damai yang dapat menjadi potensi konflik
5. Rendahnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat yang mengakibatkan belum maksimalnya kesadaran bela negara masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan kesatuan Bangsa dan Politik:

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				14.168.618.549,00					14.168.618.549,00	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				14.168.618.549,00					14.168.618.549,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	1.825.618.549,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	1.825.618.549,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	12.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	12.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1,00	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	3.000.000,00	

RENCANA AWAL KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1,00	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1,00	2.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2,00	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2,00	3.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4,00	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4,00	2.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,000	1.594.568.549,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,000	1.594.568.549,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	1.589.568.549,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	1.589.568.549,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00	750.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4,00	4.250.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4,00	4.250.000,00

RENCANA AWAL KERJA 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,000	21.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,000	21.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20,00	1.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20,00	1.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	122,00	20.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	122,00	20.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,000	141.200.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,000	141.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	120,00	1.200.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	120,00	1.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	30.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	30.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	110.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	110.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100,000	56.850.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100,000	56.850.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11,00	49.786.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11,00	49.786.000,00	

RENCANA AWAL KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11,00	6.264.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11,00	6.264.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15,00	800.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15,00	800.000,00
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan/penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)	50,000	400.000.000,00	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan/penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)	50,000	400.000.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)	50,000	400.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)	50,000	400.000.000,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50,00	25.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50,00	25.000.000,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	4,00	34.157.000,00	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	4,00	34.157.000,00
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (Orang)	70,00	340.843.000,00	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (Orang)	70,00	340.843.000,00

RENCANA AWAL KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik (%)	90,000	11.038.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik (%)	90,000	11.038.000.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pesentase Masyarakat dan Partai Politik yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula (%)	90,000	11.038.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pesentase Masyarakat dan Partai Politik yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula (%)	90,000	11.038.000.000,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	13,00	11.038.000.000,00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	13,00	11.038.000.000,00

RENCANA AWAL KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	80,000	255.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	80,000	255.000.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	80,000	255.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	80,000	255.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	630,00	200.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	630,00	200.000.000,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	3,00	55.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	3,00	55.000.000,00

RENCANA AWAL KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah (%)	100,000	650.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah (%)	100,000	650.000.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)	100,000	650.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)	100,000	650.000.000,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan P'erbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	240,00	50.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	240,00	50.000.000,00
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12,00	600.000.000,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12,00	600.000.000,00
J U M L A H			14.168.618.549,00				14.168.618.549,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat di peroleh melalui kegiatan musrenbang dimulai pada tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Musrenbang ini berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Program dan kegiatan tersebut yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 yang sejalan dengan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah:

1. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
2. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024: "Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman".

Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesbang dan Politik Kab. Sidrap guna mendukung program prioritas pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Konflik dalam rangka deteksi dini dan cegah dini.
2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan pengawaasan dan pemberdayaan ormas.
4. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat dirumuskan tujuan yaitu: “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis”, dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi karakter kebangsaan

3.3 Program dan Kegiatan

untuk target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dapat dirumuskan Rencana Kerja sebanyak 5(Lima) program, 9 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota
 1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - d) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - 3) Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 2) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

➤ Program Penguatan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan: Peumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaanbidang ideology pancasila dan karakter kebangsaan

Sub Kegiatan

1. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologin wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
2. Pembinaan terhadap aktivitaskepaskibrakaan dan purnapaskibraka
3. Pembentukan paskibraka

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Pemantauan Situasi Budaya Politik

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Sub kegiatan:

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pemimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang di butuhkan pada tahun 2024 untuk Belanja sebesar Rp. 14.168.618.549, dan diperkirakan pada tahun 2025 sebesar Rp. 4.080.570.234 dimana sumber pendanaanya bersumber dari APBD II Kab. Sidenreng Rappang.

Rumusan rencana program dan kegiatan pada tahun 2024 dan perkiraan maju pada tahun 2025 dapat di uraikan pada tabel berikut:

TABEL T-C 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	Taget Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Taget Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				14.168.618.549,00				4.080.570.234,00
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				14.168.618.549,00				4.080.570.234,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100,00	1.825.618.549,00				1.833.820.234,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)		100,00	12.000.000,00				12.120.000,00
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1,00	2.000.000,00			1,00	2.000.000,00

RENCANA AWAL KERJA 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	3.000.000,00		2	3.000.000,00
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1,00	2.000.000,00		1	2.000.000,00
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2,00	3.000.000,00		2	3.000.000,00
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4,00	2.000.000,00		4	2.120.000,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,000	1.594.568.549,00			1.596.614.234,00
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	1.589.568.549,00		252	1.591.314.234,00
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00	750.000,00		1	800.000,00
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4,00	4.250.000,00		4	4.500.000,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,000	21.000.000,00			21.210.000,00

RENCANA AWAL KERJA 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20,00	1.000.000,00			25	1.100.000,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	122,00	20.000.000,00			125	20.110.000,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,000	141.200.000,00				142.612.000,00
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	120,00	1.200.000,00			130	1.300.000,00
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	30.000.000,00			12	30.000.000,00
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	110.000.000,00			12	111.312.000,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100,000	56.850.000,00				61.264.000,00
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11,00	49.786.000,00			11	55.000.000,00
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11,00	6.264.000,00			11	6.264.000,00
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15,00	800.000,00				-
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI	Persentase Masyarakat yang						

RENCANA AWAL KERJA 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)		50,000	400.000.000,00				459.000.000,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)		50,000	400.000.000,00				459.000.000,00
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		50,00	25.000.000,00			70	60.000.000,00
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)		4,00	34.157.000,00			5	48.157.000,00
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (Orang)		70,00	340.843.000,00			80	350.843.000,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik (%)		90,000	11.038.000.000,00				840.700.000,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Masyarakat dan Partai Politik yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula (%)		90,000	11.038.000.000,00				840.700.000,00

RENCANA AWAL KERJA 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	13,00	11.038.000.000,00			11	840.700.000,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	80,000	255.000.000,00				235.550.000,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	80,000	255.000.000,00				235.550.000,00
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	630,00	200.000.000,00			630	200.550.000,00
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	3,00	55.000.000,00			3	35.000.000,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah	100,000	650.000.000,00				711.500.000,00

RENCANA AWAL KERJA 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	KONFLIK SOSIAL	(%)						
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)		100,000	650.000.000,00			711.500.000,00
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		240,00	50.000.000,00		240	56.500.000,00
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		12,00	600.000.000,00		12	655.000.000,00
J U M L A H					14.168.618.549,00			4.080.570.234,00

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN****Program dan kegiatan**

Pelaksanaan program/kegiatan dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa faktor permasalahan yang dihadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran/target.

Faktor pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai tahun 2024 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenrang Rappang, karena secara tidak langsung berkaitan dengan pembangunan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Sehingga diharapkan adanya persamaan persepsi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tim anggaran daerah dalam mengukur besaran anggaran yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Uraian Pelaksanaan Program Kegiatan, adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

RENCANA AWAL KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestrian SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Penguatan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan 2. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 3. Pembentukan Paskibraka
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika

RENCANA AWAL KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Pemantauan Situasi Budaya Politik	Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	<p>1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>

RENCANA AWAL KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. 2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pemimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
---	--	--	---

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2024 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunan dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditentukan, termasuk pemenuhan target tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: “***Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis***”.

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 yaitu: meningkatkan peran Konflik dalam rangka deteksi dini, menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat, mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas serta meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.

Semoga penyusunan renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian target kinerja.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,

Ir. R U L I, MT

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19640727 199603 1 002